

PU Segera Selesaikan Jalan Tol Tanjung Priok

[JAKARTA] Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera menyelesaikan pembangunan jalan tol Tanjung Priok sepanjang 11,36 km. "Kita tengah kebut untuk menyelesaikannya," kata Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok, Kementerian PU, Bambang Nurhadi, kepada SP, Selasa (19/2).

Pembangunan jalan tol ini dibagi menjadi lima seksi yakni Seksi E1 Rorotan-Cilincing, Seksi E2 Cilincing-Jampea, Seksi E2A Jampea-Simpang Jampea, Seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudarso dan Seksi NS Direct Ramp.

Bambang menjelaskan, saat ini, Seksi E1 Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 km konstruksi sudah selesai 100% dan sudah difungsikan tanpa tarif. Progres fisik per 14 Februari 2013 beberapa seksi yakni, Seksi E2 Cilincing-Jampea (2,74 km) mencapai 18,38%. Seksi E2A Jampea-Simpang Jampea (1,92 km) sebesar 11,73%. Seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudarso (2,24 km) mencapai 69,84%. Sedangkan Seksi NS Direct Ramp (1,1 km) masih dalam proses lelang.

Pembangunan ruas tol

ini, kata dia, masih terkendala pembebasan lahan dan utilitas. Seksi E2 Cilincing-Jampea luas tanah yang sudah dibebaskan mencapai 91.095 m² (94%). Seksi E2A Jampea-Simpang Jampea, tanah yang sudah bebas seluas 52.586 m² (70%). Pada seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudarso, tanah yang sudah bebas seluas 5.237 m² (38%). Seksi NS Direct Ramp, tanah

yang sudah bebas seluas 3.304 m² (81%).

Sementara untuk utilitas yang saat ini dalam proses pemindahan adalah utilitas milik PLN di Seksi E2-E2A-NS, Pintu Air Kali Koja di seksi E2A, Tugu Pelindo di seksi NS dan Masjid At-Tauhid di seksi E2A.

Menurut Bambang, dalam pemba-

ngunan jalan ini tidak hanya masalah fisik konstruksi, tapi kami juga menghadapi masalah sosial. Sebagian masyarakat enggan untuk memberikan dokumen tanah karena sesuatu hal.

"Namun, dengan penjelasan kepada masyarakat tinggal beberapa dari mereka yang kekeh tidak mendukung pekerjaan ini. Bahkan mereka menuntut ganti rugi jauh di atas NJOP," ujar Bambang. [E-8]

“
Dalam pembangunan jalan ini tidak hanya masalah fisik konstruksi, tapi kami juga menghadapi masalah sosial. Sebagian masyarakat enggan untuk memberikan dokumen tanah karena sesuatu hal